

Model Strategi Sinergitas DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan dalam Implementasi Program Kota Layak Anak

Lilik Sumarni^{1,*}, Siska Yuningsih²

^{1,2}Ilmu Komunikasi, FISIP, UMJ, Jl. K. H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Tangerang Selatan, 15413

*E-mail : liliksumarni1@gmail.com

ABSTRAK

Penghargaan dan prestasi Kota Layak Anak (KLA) yang diraih Kota Tangerang Selatan menarik untuk diteliti karena sebagai kota dengan predikat layak anak masih menghadapi berbagai kendala; seperti kekerasan dan penelantaran anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang strategi sinergi DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan Program KLA. Penelitian ini menggunakan teori Humas dari Scott M. Cutlip & Allen H. Center dan tahapan strategi dari Samuel C Certo & J. Paul Peter dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan strategi sinergi DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Program KLA yang dijabarkan dalam pengelolaan kelembagaan dimana prosesnya melibatkan berbagai pihak dan stakeholders seperti KPP-PA, kerjasama dengan organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, media dan dukungan walikota Tangerang Selatan serta pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi yang bertujuan untuk memenuhi 5 kluster Pemenuhan Hak Anak. Keluaran panitia penelitian ini berupa model strategi sinergi DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan program KLA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam implementasi dalam kota layak anak ini diperlukan integrasi data yang maksimal, sehingga dibutuhkan kerja sama tim yang baik, serta adanya instansi yang memberikan bantuan untuk mengeksposnya ke media massa. Diperlukan juga koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam proses perlindungan anak dalam mengimplementasikan kota layak anak. Sehingga dapat terpetakan ke khasan permasalahan anak di setiap wilayah.

Kata kunci: Model. Strategi Sinergi. DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan. Kota Layak Anak.

ABSTRACT

The award and achievement of a Child-Friendly City (KLA) achieved by the City of South Tangerang are interesting to study because as a city with the title worthy of children it still faces various problems; such as violence and child neglect. The purpose of this research is describing about South Tangerang City DPMP3AKB synergy strategy in implementing the KLA Program. This research uses the theory of Public Relations from Scott M. Cutlip & Allen H. Center and the stages of strategy from Samuel C Certo and J. Paul Peter, a qualitative descriptive approach. The results of this study describe the synergy strategy of DPMP3AKB of South Tangerang City in implementing the KLA Program which is described in institutional management where the process involves various parties and stakeholders such as KPP-PA, collaboration with community organizations, academia, the business world, the media and the support of the South Tangerang mayor and the influence of the internal environment and external organizations aimed at fulfilling 5 clusters of fulfilment of children's rights. The output of this research resulted in the synergy strategy model of DPMP3AKB South Tangerang City in implementing the KLA program. The conclusion is that implementation in a child-friendly city requires maximum data integration, so that good teamwork is needed, as well as the existence of agencies that provide assistance to expose it to the mass media. There is also a need for a coordination between related institutes in the process of protecting children in implementing child-friendly cities. So, that it can be mapped to the specific problems of children in each region.

Keywords: Model. Synergy Strategy. DPMP3AKB South Tangerang City. Child Friendly City.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan anak saat ini masih sangat penting mendapat perhatian utama

baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu Kementerian PP-PA sangat konsen dengan masalah ini, bersama dengan akademisi, LSM dan organisasi masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kabupaten atau Kota bersinergi untuk melaksanakan program-program untuk menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman kepada anak atau lingkungan ramah anak. Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang mendapatkan penghargaan kota layak anak pada tahun 2017. Pada tahun 2019 penghargaan kembali diraih Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya untuk pertamakalinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia (@TangerangNews / Rachman Deniansyah, 25 Juli 2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangsel ibu Khairati mengatakan bahwa pestasi itu diraih berkat kerjasama para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder). Menurutnya, tingkat Nindya yang diperoleh Kota Tangsel ini adalah ketiga dari lima tingkatan kategori. Kelima tingkatan itu diantaranya; KLA kategori pratama, KLA kategori madya, KLA kategori Nindya, KLA kategori utama, dan Kota Layak Anak. Tangsel telah menerima penghargaan KLA kategori pratama pada tahun 2013, 2015, dan 2017. Penghargaan KLA kategori madya pada tahun 2018, dan tahun 2019

2. METODE PENELITIAN

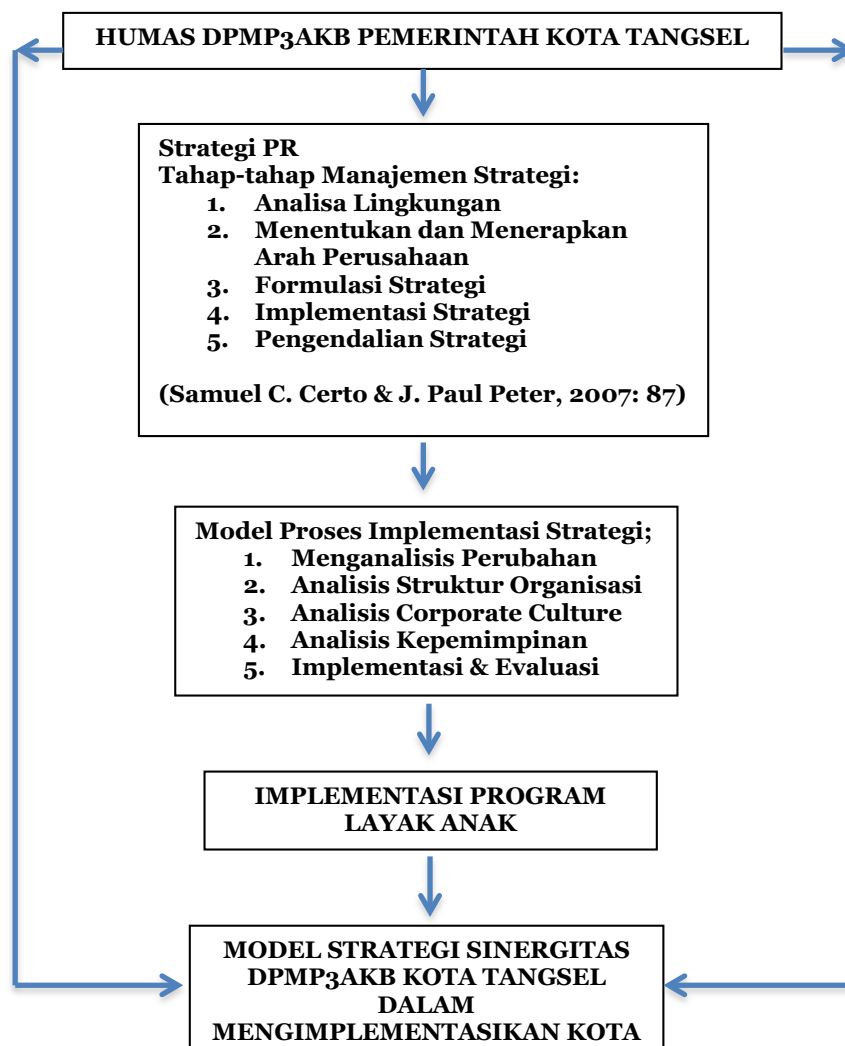
kategori nindya (@TangerangNews / Rachman Deniansyah, 25 Juli 2019).

Berdasarkan data diatas maka perhatian untuk keselamatan anak-anak harus mendapat prioritas utama bagi pengemban keputusan ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka menekan jumlah kejahatan terhadap anak yang terjadi dijalan, seperti ketika anak pulang dari sekolah, hal ini berkenaan dengan tanggungjawab bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan implementasi yang maksimal mengenai Kota Layak Anak.

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2012:9) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dengan triangulasi dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan yaitu mulai bulan Maret 2020 sampai Agustus 2020. Lokasi penelitian di Pemkot Tang – Sel. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Humas DPMP3AKB Tangsel.

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interprestasi data dan triangulasi. Dari analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.



Gambar 1. Framework Research

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Public Relations DPKMP3AKB

Strategi humas DPMP3AKB meliputi tahap-tahap manajemen strategi, dengan menggunakan teori ada 5 langkah sebagai berikut:

1. Analisa Lingkungan

Dalam melakukan analisis lingkungan DPKMP3AKB selalu melihat perkembangan yang terjadi dan trend didalam masyarakat, dalam hal ini DPKMP3AKB mempublish aktivitas yang dilakukan lalu mendokumentasikan

dalam laman web nya. Beberapa telah terekam dalam berita analisis lingkungan yang dilakukan sebagai berikut; karena perkembangan infrastruktur yang sangat maju, Kota Tangsel bertekad harus menjadi kota layak huni bagi semua masyarakatnya, mulai dari anak-anak, dewasa hingga disabilitas (*sumber: <https://palapanews.com/2019/03/06/gelar-forum-opd-dpmp3akb-tangsel-fokus-pengembangan-sdm/>*).

2. Menentukan dan menerapkan arah organisasi

a. Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data evaluasi Renja.
c. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018

3. Formulasi Strategi

Formulasi strategi terekam dalam rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja DPMP3AKB s/d tahun 2018.

Tabel 1. Formulasi Strategi

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
1.	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
2.	Program pengembangan sumber daya aparatur	Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
3.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
4.	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
5.	Program pengembangan data dan informasi	Cakupan data dan informasi SKPD
6.	Pengolahan data dan informasi	Meliputi; Jumlah dokumen data base DPMP3AKB, jumlah penyediaan dan pemanfaatan data gender terpilah, jumlah penyusunan laporan informasi data keluarga berencana.
7.	Pengembangan Komunikasi, Sistem informasi dan Media Masa	Cakupan pembangunan, operasional dan pemeliharaan system di SKPD
8.	Program penguatan kelembagaan dan pengaruhutamakan gender dan anak.	Jumlah kelurahan dan kecamatan ramah anak. IPG dan IDG
9.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah dokumen bahan evaluasi kota Layak Anak.
10.	Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	- Jumlah perempuan dan anak yang terlayani dalam pengembangan pelayanan P2TP2A - Jumlah kecamatan dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) - Jumlah pos pelayanan terpadu yang terbina - Jumlah rukun warga dengan satgas perlindungan anak - jumlah forum anak yang dikembvangkan - Jumlah keluarga yang terbina dalam pengasuhan anak.
11.	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan anak	-Cakupan ODP yang menerapkan PUG - jumlah partisipasi perempuan dalam politik
12.	Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
13.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah tim Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO)
14.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah perempuan dan anak yang terlindungi dalam Lembaga pernikahan
15.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan
16.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah perempuan yang berusaha dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
17.	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina
18.	Program keluarga berencana	Proporsi PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun
19.	Program peningkatan peran serta	Jumlah pemanfaatn inovasi TTG dalam pemberdayaan masyarakat.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
		Prosentase peran serta Lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
20.	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah inovasi TTT di Masyarakat
21.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pelatihan dan pembinaan. Cakupan peningkatan gotong royong melalui BBGRM
22.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Cakupan peningkatan kader posyandu. Cakupan peningkatan kader PKK melalui pelatihan dan pembinaan. Jumlah kelompok yang berpartisipasi pembinaan dan pelatihan Lembaga pemberdayaan masyarakat. Cakupan pembinaan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Cakupan peningkatan Perkembangan Kelurahan melalui Evaluasi perkembangan kelurahan.

4. Implementasi Strategi

(a) *Pertama*, DPMP3AKB Kota Tangsel menyelenggarakan deklarasi Kota Layak Anak dan pengarusutamaan gender berlangsung di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, yang bertujuan memenuhi hak anak dan perlindungan terhadap anak. Semua dilaksanakan dengan memfungsikan seluruh perangkat daerah tangsel. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, partisipasi anak, akta kelahiran, informasi layak anak; hal ini merupakan indicator dari KLA (Kota Layak Anak) yang telah dijalankan oleh pemkot Tangsel.

(Sumber:

<http://www.bantenperspektif.com/2018/02/airin-deklasikan-tangsel-kota-layak.html>).

(b). *Kedua*, dengan membentuk Pengembangan Ekonomi Perempuan Indonesia (PEPI) Kota Tangerang Selatan 54 koordinator wilayah di tingkat kelurahan. Hal itu diungkapkan Endang Sri Iriani selaku Ketua sekaligus founder PEPI Tangsel. (sumber: <https://kabar6.com/pembentukan-54-kordinator-wilayah-pepi-tangsel-targetkan-rampung-di-2019/t>).

Model Proses Implementasi Strategi DPKMP3AKB

Model proses implementasi strategi DPKMP3AKB Tangsel meliputi hal-hal sebahai berikut:

1. Menganalisis perubahan

Melakukan analisis perubahan DPKMP3AKB melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Renja DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2019, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dari informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan 2016-2021 serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.

Perubahan Renja DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Perubahan Renja DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan.

b. Melakukan pembenahan dibidang pelayanan Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik (SPBE), karena DPKMP3AKB merupakan bagian dari pemerintahan Tangsel. Hal ini dapat dibuktikan dengan menerima predikat terbaik se-Indonesia dalam laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Penerima Diskominfo Kota Tangsel (*kabaronline.com: Profesional dan Visioner, Begini Rekam Jejak Benyamon Davnie-Pilar Saga Ichsan*).

c. Membentuk Pengembangan Ekonomi Perempuan Indonesia (PEPI) Kota Tangerang Selatan dengan 54 koordinator wilayah di tingkat kelurahan.

(sumber : <https://kabar6.com/pembentukan-54-kordinator-wilayah-pepi-tangsel-targetkan-rampung-di-2019/t>)

Berkomitmen berbagai program pembinaan langsung ke sekolah-sekolah di kota Tangsel. Komitmen ini diwujudkan dari mulai tingkat PAUD hingga tingkat SMP, bahkan dari RA hingga MTS se Kota Tangsel.

(sumber : <https://pojoksatu.id/banten/2018/12/17/pemkot-tangsel-raih-peringkat-dua-kota-layak-anak/asyarakat,duniausaha,media%20keluarga%20sampai%20kepada%20anak%20itu%20sendiri>).

e. Pendidikan agama, karakter para pelajar akan semakin diperkuat. Untuk mewujudkan kota Ramah anak DPMP3AKB Tangsel melakukan Pendidikan agama dalam rangka memperkuat karakter anak-anak sedini mungkin.

(sumber : <https://www.republika.id/posts/4795/ratusan-siswa-ikuti-pembinaan-pendidikan-agama>)

2. Analisa Struktur Organisasi

Analisa struktur organisasi dilakukan dengan melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mewujudkan clean government sampai ketinggian terbawah.

3. Analisa Budaya Perusahaan /Corporate Culture

Analisa budaya perusahaan dengan melakukan hal-hal berikut:

- Lomba Inovasi
- Menghindari Penyalahgunaan wewenang
- Menciptakan Motivasi kerja
- Komitmen organisasi
- Membangun budaya organisasi yang Tangguh dan relevan dengan kondisi pandemic seperti saat ini
- Adaptasi ditengah situasi krisis
- Bina Organisasi Perempuan

4. Implementasi dan Evaluasi Strategi Implementasi Program/Kegiatan DPMP3AKB yang berkaitan dengan KLA ada 15 diantaranya:

- Penguatan tim gugus tugas KLA
- Rakor dan monev KLA
- Pembentukan dan pembinaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan
- Sosialisasi KLA
- Pembinaan kecamatan dan kelurahan layak anak
- Monev Puskesmas Layak Anak
- Fasilitas Kegiatan pusat pembelajaran keluarga
- Fasilitas UPTD P2TP2A
- Pembinaan jejaring perlindungan perempuan dan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Fasilitas kegiatan tindak perdagangan orang (TPPO)
- Pembentukan dan pembinaan kelompok Bina keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat konseling Remaja (PIK-R)
- Lomba Teknologi tepat guna tingkat sekolah
- Fasilitas Daycare pemkot Tangsel (Sumber: Wawancara daring dengan ibu Dra. Irma Safitri, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DPMP3AKB, 14 Sept 2020).

Mengenai Implementasi Kota Layak Anak Menurut Humas DPMP3AKB

Dr. Irma Syafitri mengatakan bahwa adanya Kota Layak Anak mengikuti Peraturan Menteri KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak) di Peraturan Menteri Nomor 11, 12, 13 dan 14 tahun 2014.

UU No. 23 Tahun 2002 diubah menjadi UU 35 Tahun 2014 pasal 72 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan Perlindungan Anak dalam ruang lingkup Kabupaten atau Kota adalah dengan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD), yaitu adanya integrasi sumber daya manusia, dan sumber daya alam untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Tugas sekretaris DPMP3AKB sendiri adalah mengumpulkan data-data tentang program yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, instansi dan masyarakat.

Ada 5 indikator Kota Layak Anak, yaitu Kluster 1 sipil dan kebebasan (seperti adanya akte kelahiran dan kartu identitas anak), Kluster 2 pengasuhan lingkungan keluarga dan alternatifnya (Lembaga perlindungan anak), Kluster 3 kesehatan dasar (imunisasi, status gizi, pelayanan Kesehatan ramah anak), Kluster 4 pendidikan dasar pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Kluster 5 perlindungan khusus anak, membicarakan bagaimana pencegahan-pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

DPMP3AKB juga sudah memiliki rencana aksi daerah kota layak anak kemudian sudah memiliki perda; ini adalah peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kota layak anak ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Pemkot Tangsel untuk bergerak tentunya oleh DPMP3KB juga, kemudian DPMP3AKB juga sudah membentuk jejaring perlindungan perempuan dan anak yang ada di kota Tangerang Selatan jadi sudah memiliki Satgas perlindungan anak yang di tingkat Kelurahan dan RW juga punya lembaga masyarakat yang namanya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ditingkat Kelurahan, kemudian juga sudah memiliki pusat pembelajaran keluarga di tingkat kota kemudian juga sudah memiliki UPTD yang unit pelaksana teknis P2TP2A, yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, yaitu suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh DPMP3KB dan juga ke Kota Tangsel kemudian apa peluang-peluang yang ada di Tangsel yang dimiliki oleh DPMP3KB, karena ini adalah program wajib, oleh karena itu dan diamanatkan oleh undang-undang maka tentunya ini menjadi peluang besar dimana tidak akan sulit meminta peran serta dari unsur-unsur yang terlibat dalam Kota Layak Anak ini.

Strateginya untuk mencapai hal tersebut tentunya DPMP3AKB selalu melakukan rapat koordinasi di awal tahun kemudian juga rapat untuk penyusunan langkah-langkah apa yang harus DPMP3AKB lakukan, mengevaluasi kegiatan-kegiatannya, serta melakukan rapat untuk menginput data-data Kota layak anak dan program-program yang berkaitan serta indikator kota layak anak. DPMP3AKB memfokuskan kepada pemenuhan indikator indikator kota layak anak sehingga akan tercapai kota-kota lain di dalam kota layak anak tentunya untuk mencapai strategi dilakukan dari tingkat Kelurahan harus layak anak, Puskesmas peelayanya kemudian Kecamatan harus layak anak kemudian baru naik ke tingkat kota B ke kota layak anak dan ini perlu kerjasama dan bukan menjadi tanggung jawab DPMP3AKB tapi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

(hasil wawancara secara langsung secara daring pada tanggal 14 September 2020).

Diskusi Mengenai Implementasi Kota Layak Anak dari Berbagai Kalangan

Berdasarkan masukan dari Kepala Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, KPP-PA, mengenai Peran DPMP3AKB tentang KLA, sebagai berikut:

a. Peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Kabupaten/ kota Layak Anak karena salah satu program kerjanya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak.

b. Peanghargaan KLA ada 5 Kategori: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Tentunya implementasi yang harus terus dilakukan memperbaiki apa yang belum tercapai dalam indicator-indikator KLA sehingga tidak hanya puas dalam beberapa indicator terus tingkatkan implementasi nya didalam menjalankan indicator-indikator tersebut sehingga pada akhirnya nanti semua indicator dapat terlaksana dengan baik.

c. Strategi yang terbaik dalam mengimplementasikan KLA adalah segera membuat perda terkait dengan KLA yang lebih spesifik terhadap kepentingan anak, ajak semua stakeholder untuk mensosialisasikan perda ini menjadi milik dan tanggungjawab Bersama.

d. Indikator yang menjadi keberhasilan KLA adalah, Pertama, dari sisi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan, deskriminasi dan perlakuan salah lainnya dan juga anak-anak tetap berhak mendapat kehidupan yang layak misalnya, kesehatan dan Pendidikannya yang dibiayai oleh negara.

e. Gambaran kota yang disebut Kota Layak Anak adalah dimana tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah, tidak ada lagi anak-anak jalanan yang berkeliaran dijalan dan meminta-minta, mengamen bahkan berani memalak penumpang mobil umum karena telah menjamin kehidupannya baik Pendidikan dan kesehatannya.

f. Program KLA yang sesuai dengan perkembangan saat ini adalah program yang mampu memberikan atau membantu anak-anak agar benar-benar terlindungi dari berbagai macam kekerasan dan anak terlantar atau jauh dari orang tuanya dapat tetap mendapatkan akses untuk sekolah.

g. Sinergi yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi KLA adalah Sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah dengan harapan kebijakan yang dibuat di pusat bisa untuk menjadi rujukan untuk membuat kebijakan atau perda di daerah (*Sumber; Wawancara daring, Muhammad Saleh, Kepala Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial Deputy Bidang Partisipasi*

Masyarakat, KPP-PA, 14 September 2020).

Input dari masyarakat (*Sumber hasil wawancara dengan ibu Julia Rosalinda S.Pd, Pendidik di PAUD, 14 September 2020*) mengenai Peran DPMP3AKB masukan dari masyarakat dirasa belum tepat sasaran, karena masih banyaknya anak-anak di Tangerang Selatan yang mengalami putus sekolah dikarenakan masalah biaya. Dengan ekonomi yang kurang mendukung mereka terpaksa harus membantu orang tua untuk mencari nafkah. Contohnya banyaknya pengamen di malam hari yang berjalan dengan membunyikan alat music. Lalu anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua memancing rejeki bagi orang dewasa. Kemudian para anak muda yang tiap malam keluar rumah untuk kebut-kebutan di jalan.

Strategi yang terbaik adalah perlu adanya Kerjasama dengan para orang tua dalam membimbing anak-anak dari yang usia dini sampai remaja serta pihak keamanan kepolisian dalam menjaga anak-anak-anak dari pergaulan bebas yang sering terlihat, dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan memberikan penyuluhan kepada para remaja dan berusaha terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana anak-anak remaja bergaul.

Program KLA yang sesuai dengan perkembangan saat ini adalah dengan menciptakan dahulu lingkungan yang ramah anak yang dapat mendorong anak untuk berpikir maju. Sejahterakan setiap anak dengan Pendidikan dan pelayanan yang ramah anak lalu sejahterakan juga ekonomi mereka dengan memberikan pekerjaan yang layak bagi anak masyarakat bawah. Karena tidak sedikit dari golongan bawah yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

Sinergi yang dibutuhkan untuk keberhasilan KLA adalah dengan bersinergi dengan dinas lingkungan yang dapat memberikan lahan bermain untuk anak dan remaja, dinas Pendidikan yang memberikan Pendidikan kepada anak sebagai sarana untuk belajar, kepolisian sebagai pihak yang mengamankan dengan memberikan keamanan bagi anak

terhadap hal-hal yang merusak anak dan remaja.

Adapun masukan dari hasil wawancara dengan pemerhati anak yang melakukan pendampingan ABH, menjelaskan beberapa hal berikut:

(1). Peran DPMP3AKB sebenarnya kurang efektif karena untuk dinas pemberdayaan perempuan dan lain-lain, ini digabung menjadi satu dengan dinas social, karena ada beberapa di kota yang digabungkan antar dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dinas sosial. Sehingga bekerjanya tidak maksimal.

(2). Bicara tentang strategi sebenarnya perlu adanya pemahaman yang sama didalam masyarakat maupun stakeholder lainnya maupun tentang pemahaman perlindungan anak, ini penting sekali. Kedua, pemahaman tentang perlindungan anak juga berbicara tentang hak anak, kemudian strateginya yang ketiga adalah adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam proses perlindungan anak dalam kota layak anak. Koordinasi diperlukan karena ketika berbicara dengan KPPPA dengan kementerian social dengan menko itu sama-sama berbicara tentang perlindungan anak, padahal masing-masing di kementerian di Lembaga KLA itu masing-masing mempunyai tugas yang berbeda sehingga tugasnya tidak tumpang tindih, keempat, perlu Kerjasama lintas sectoral.

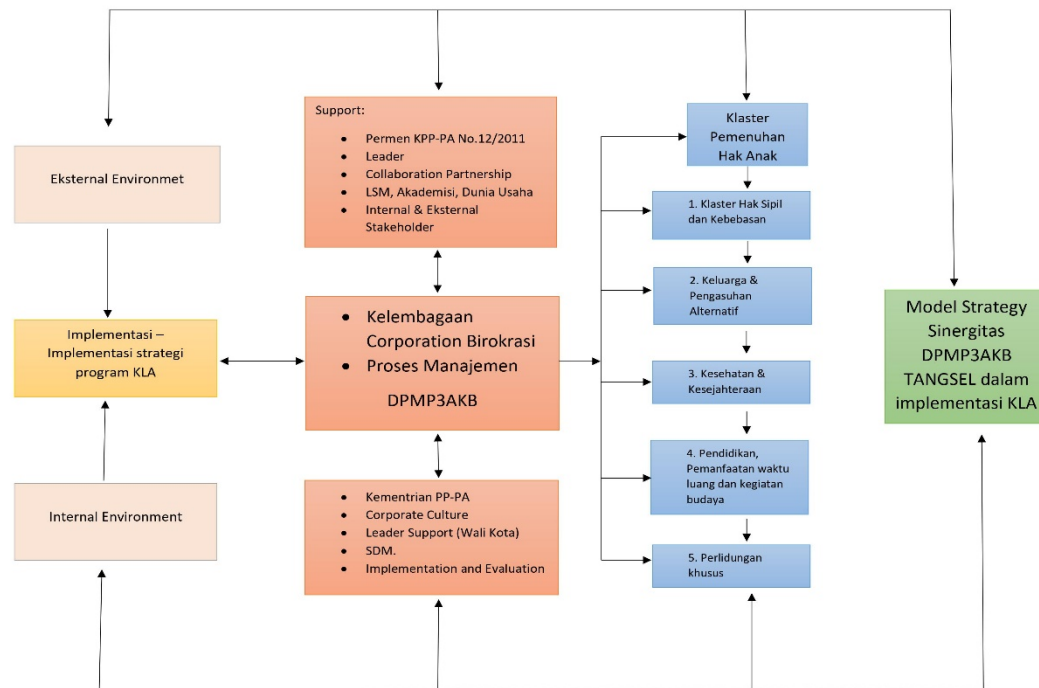
(3). Yang menjadi indikator untuk keberhasilan kota layak anak, yang pertama, satu bahwa di kota atau kabupaten diterapkannya kota layak anak perlindungan anak menjadi hal nomor satu itu indikatornya; yaitu keselamatan dan kesejahteraan itu yang lebih penting. Kedua, tidak adanya tindak kekerasan,

baik kekerasan yang dilakukan oleh keluarga sendiri, maupun orang terdekat maupun dimasyarakat. Kemudian yang ketiga, anak berada didalam keluarga yang memiliki pengasuhan yang baik sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang diluar Tindakan anak, kemudian anak juga tidak akan melakukan tindakan hukum, kemudian anak menjadi baik karena diasuh oleh orang tua yang tahu cara pengasuhan yang baik, sebenarnya indicator kota layak anak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sarana prasarana mendukung sekali dalam aktifitas anak hari-hari.

(4). Misalnya saja sudah dikeluarkannya pergub atau peraturan wali kota tentang perlindungan anak, Ketika disebut KLA. Karena kalo sudah ada kebijakannya bicara tentang pergub kebawahnya akan jauh lebih mudah dalam proses implementasi.

(5). Berbicara mengenai sinergi ini ada dua hal, yang pertama bicara tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bicara tentang KLA tentu bicara tentang kewenangan kabupaten/ kota, ini ada di propinsi daerah tingkat dua, kebijakan sudah mengarah kepusat yaitu ke kementerian KPP-PA, tetapi bicara tentang anggaran, anggaran yang digunakan adalah anggaran APBD. Masalah anggaran di pusat mendorong tetapi di kabupaten/kota tidak mempunyai anggaran untuk KLA. Sehingga sinergitas selain ada kewenangan termasuk tersedianya anggaran yang jelas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kabupaten/kota (*Hasil wawancara langsung dengan Dr Maria Sri Iswari, sebagai aktifis yang konsen dengan pendampingan AB, 14 September 2020*).

MODEL STRATEGI SINERGITAS DPKMP3AKAB KOTA TANGSEL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KOTA LAYAK ANAK



Gambar 2. Model Strategi Sinergitas DPMP3AKB Kota Tangsel Dalam Mengimplementasikan Kota Layak Anak

Ket: Pemkot Tangsel telah memiliki Perda No.1 Tahun 2018 tentang Kota Layak Anak.

4. KESIMPULAN

Model strategi sinergitas DPMP3AKB Kota Tangsel dalam mengimplementasikan Program Kota Layak Anak terdistribusikan dimana dalam manajemen kelembagaan dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak dan stakeholder seperti KPP-PA, kolaborasi dengan organisasi masyarakat, akademis, dunia usaha, yang memperhitungkan pengaruh dari lingkungan internal dan eksternal organisasi, kemudian juga dukungan dari wali kota dalam rangka memenuhi 5 kluster pemenuhan hak anak seperti; Kluster hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam implementasi dalam kota layak anak ini diperlukan integrasi data yang maksimal,

sehingga dibutuhkan kerja sama tim yang baik, serta adanya instansi yang memberikan bantuan untuk mengeksposnya ke media massa. Diperlukan juga koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam proses mengimplementasikan kota layak anak. Sehingga dapat terpetakan ke khasan permasalahan anak di setiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwinata, J. S., & Mulyono, D. (2018). Community Education in the development of The Community. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 25-35.
- David, Fred R, (2011) *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 7. Penerbit Pearson Education Asia

- Pte.Ltd dan PT. Prenhallindo Jakarta
- Tjiptono, Fandy & Candra Gregorius. Service, Quality and Satisfaction. (Yogyakarta: Penerbit Andi 2005).
- H. Frazier Moore; *Humas, Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung, Mei 2004.
- Frank Jefkins, *Public Relations*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, 2004.
- Peter, Paul.J & Certo, Samuel, C. (1995). *Strategik Manajemen Concepts and Applications*, United States Of America: Irwin.
- Rosady Ruslan; *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1999.
- Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relations; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Scot M. Cutlip and Allen H. Center; *Effective Public Relations*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Deborah J. Barrett; *Leadership Communication*
- Vincent Miller; *Understand Digital Culture*, SAGE Publications, London, 2011.
- Jacquie L'Etang; *Public Relations (Concepts, Practice and Critique)*, SAGE Publications, London, 2008.
- Deirdre K. Breakey; *Social Media and Public Relations (Eight New Practices For The PR Professional)*, FT Press, New Jersey, 2012.
- Kompas.com; Pemkot Tangsel Sebut Anak-anak Mendominasi Korban Kekerasan Tahun 2018, Senin, 11 Februari 2019, 17:45 Wib*).
- Freddy Rangkuti (2013); *Riset Pemasaran*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA
- Web:
- (@TangerangNews / Rachman Deniansyah, 25 Juli 2019).
 - *Kompas.com; Pemkot Tangsel Sebut Anak-anak Mendominasi Korban Kekerasan Tahun 2018, Senin, 11 Februari 2019.*
- Website :
<https://dpmp3akb.tangerangsela.tankota.go.id>

